



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DRS. MOHAMMAD TAUFIK, MH.**
2. Jabatan : **PANITERA PENGGANTI**
3. NHK : **441614**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	496.072.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 427 m2/100 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 85.400.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m2/30 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m2/30 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 13.920.000		
4. Tanah Seluas 393 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 25.152.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 623 m2/200 m2 di KAB / KOTA BOGOR, WARISAN Rp. 354.600.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	73.909
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	496.145.909
III. HUTANG	Rp.	298.203.214
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	197.942.695

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **15 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.